



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

Terlamir

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 14–18 Oktober 2020.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Tinggi Pengadilan Militer beserta jajarannya, serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta jajarannya dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. PENJELASAN KAKANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dilakukan di Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2020. Tim Komisi III DPR RI mengunjungi sistem pelayanan dan pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi Surabaya dilanjutkan rapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Jajarannya.

1. BIDANG ANGGARAN

1.1 Realisasi Penyerapan Anggaran

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki 63 unit kerja yang tersebar di 38 Kabupaten/ kota di Jawa Timur.
- Pagu Anggaran Rp.608.519.919.000,- (*Enam ratus Delapan Miliar, Lima Ratus Sembilan Belas Juta, Sembilan Ratus, Sembilan Belas Ribu Rupiah*). Setelah di Disbursement Plan per-tanggal 8 Oktober sebesar Rp.474.294.513.000,- (*Empat Ratus, Tujuh Puluh Empat Miliar, Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta, Lima Ratus Tiga Belas Ribu*) atau (77,59%).
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.462.929.868.293,- atau (76.07%) Deviasi (-1,53%).
- Kendala-kendala yang dihadapi di Kantor wilayah hukum dan Ham Jatim adalah :
 - 1) Tidak tercapainya target PNBPN. Target capaian PNBPN TA. 2020 untuk UPT di Jawa Timur telah ditetapkan melalui target capaian volume output yang terdapat pada DIPA TA. 2020 masing masing UPT penghasil PNBPN (Kanim, Kanwil pada layanan AHU, Kanwil pada layanan KI, dan BHP).
 - 2) Anggaran Belanja Tambahan Baru Turun Pada Akhir September. Adanya ABT dari BPHN untuk Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi) prosesnya berlangsung sejak Agustus - September sehingga diperlukan addendum dan revisi anggaran yang baru bisa dilakukan diakhir September untuk menyesuaikan dengan tambahan anggaran tersebut.
 - 3) Realisasi Belanja Modal Terkendala Pandemi. Realisasi belanja modal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebesar 51,16% atau Rp. 3.380.210.478,- dari Pagu Anggaran Rp. 6.607.645.000,-
- Proses realisasi anggaran belanja modal saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - 1) Pada Triwulan I masih dilakukan proses review serta revisi DIPA dan saat ini dikarenakan pandemi COVID-19, proses lelang baru selesai dilaksanakan pada Triwulan III. Pada Triwulan III dan IV diperkirakan realisasi belanja modal akan meningkat signifikan seiring selesainya pekerjaan dan pembayaran tagihan atas pekerjaan tersebut.
 - 2) Estimasi penyelesaian pekerjaan belanja modal pada bulan Oktober – Desember tahun 2020 sehingga dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran belanja.

1.2 Dukungan Anggaran

- Kebutuhan dukungan anggaran Kanwil Kumham yaitu dengan minimnya belanja Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tusi di Jajaran Pemasyarakatan dan Anggaran Bahan Makanan dan Daya Jasa (listrik dan air).
- Program Prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional Kanwil Kumham Jatim antara lain; a). Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (694 orang) sebesar Rp. 5.552.000.000,-; b). Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (96 Kelompok Masyarakat) sebesar Rp. 1.024.320.000,- dan c). Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (61 Lembaga) sebesar Rp. 100.000.000,-.

2. BIDANG PENGAWASAN

2.1 Bidang Pemasyarakatan

- Penjelasan terkait kapasitas hunian pada tahun 2017 sebanyak 11648 orang napi, Jumlah hunian 23765 orang Napi, overcrowded 103 %. Pada Tahun 2018 Kapasitas hunian sebanyak 12358 orang napi, jumlah hunian sebanyak 26552

orang napi, overcrowded 115 %, dan Pada Tahun 2019 Kapasitas hunian sebanyak 12757 orang napi, jumlah hunian sebanyak 2877 orang napi , overcrowded 126%. Sementara Tahun 2020 bulan januari Kapasitas hunian sebanyak 12.846 orang napi, jumlah hunian sebanyak 29.618 orang napi, overcrowded 132 %, dan bulan Oktober 2020 Kapasitas hunian sebanyak 12.486 orang napi, jumlah hunian sebanyak 25.283 orang napi, dan overcrowded 97%.

- Kebijakan Kanwil Kumham Jatim dalam mengurangi dampak Overcrowded adalah sebagai berikut ;
 - 1) Implementasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.
 - 2) Melakukan pemetaan dan pemerataan tingkat hunian pada lapas/ rutan jajaran.
 - 3) Mengurangi jumlah Overstaying.
 - 4) Mendorong kepolisian dan Kejaksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan JC dan Surat Penetapan Bukan Pelaku Utama.
 - 5) Implementasi Permenkumham Nomor 10 tahun 2020
- Terkait meningkatkan keamanan Lapas / Rutan adalah ;
 - 1) Membentuk Tim intelijen Kantor wilayah dan UPT Lapas / Rutan
 - 2) Membentuk Tim Satopspannal penguatan kedisipinan petugas dan warsik.
 - 3) Membentuk Tim satgas Kamtib/ P4GN yang bertugas
 - 4) Penguatan Kerjasama dengan instansi terkait; Polisi, TNI dan BNN dalam bentuk MOU.
 - 5) Meningkatkan pengaduan dari dalam dan luar yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
 - 6) Membuat ruang khusus koordinasi dan konsultasi terkait P4GN
- Upaya-upaya dalam pencegahan penyebaran Covid 19 adalah ;
 - 1) Membuat satgas percepatan penanganan covid 19
 - 2) Relokasi anggaran dan refocusing kegiatan
 - 3) Menyediakan sarana prasarana pencegahan covid 19
 - 4) Membuat surat edaran terkait pencegahan dan penanganan covid 19 pada lapas /rutan
 - 5) Meniadakan layanan kunjungan dan mengganti dengan kunjungan online
 - 6) Mendistribusikan bantuan untuk masyarakat, tenaga medis, dan kelompok terdampak
 - 7) Layanan penitipan barang WBP drive thru
 - 8) Optimalisasi sistem WFH dan WFO serta membagikan multivitamin kepada seluruh pegawai.
 - 9) Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan dalam skala besar
 - 10) Rutin memberikan pengarahan untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat
 - 11) Melakukan kegiatan bersih-bersih ruangan dan lingkungan unit kerja secara rutin.
 - 12) Melakukan rapidtest dan swab test secara berkala.
 - 13) Tidak menerima tahanan A1 dan A2. Apabila menerima tahanan A3 (yang sudah inkraht tetap harus melalui proseura yang ada.
 - 14) Memfasilitasi persidangan dan pembinaan kerohanian secara online.
 - 15) Produksi hand Sanitizer dan Masker.
- Warga Binaan Pemasyrakatan yang terpapar Covid-19 yaitu angka kematian berjumlah 2 orang dari Lapas Kelas I Surabaya. Petugas Lapas /Rutan yang terpapar covid 19 konfirmasi berjumlah 13 orang terdiri 4 orang dari Lapas I Surabaya dan 9 orang dari Lapas Kelas IIB Mojokerto sedangkan selesai isolasi berjumlah 16 orang.
- Upaya Penangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemprov, Pemkab/Pemkot dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment).; Membaca blok isolasi; Tidak menerima tahanan A1 dan A2. Serta menerapkan keterbukaan informasi kepada media massa.

2.2 Fungsi Keimigrasian

- Data Orang Asing di Jawa Timur antara lain Pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 424 orang, pemegang izin tinggal terbatas sebanyak 4173 orang serta pemegang izin tetap sebanyak 246 orang. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 4847 orang.
- Data Penindakan Imigrasi Projustisia sebanyak 1 orang, Tindak Administrasi Keimigrasian sebanyak 82 orang, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 83 orang.

3. SESI PENDALAMAN

Pada sesi pendalaman anggota tim Komisi III menanyakan beberapa sebagai berikut;

- Terkait penyelesaian kasus HAM Pembangunan masjid Imam Sjafei di Tulungagung.
- Apresiasi capaian PNBP-HKI yang luar biasa, Apresiasi kepada Kanim Blitar yang kinerja dalam upaya memperjuangkan hibah tanah.
- Terkait keimigrasian perkembangan kasus Kewarganegaraan ganda yang ada di Tulungagung.
- Penjelasan Lapas Arjasa yang sudah ditetapkan menjadi Lapas Super Maximum Security. Meminta segera melakukan inventarisasi napi teroris dan napinarkoba yang berbahaya. Sehingga bisa melakukan mitigasi resiko dan bisa dipindah ke Arjasa.
- Evaluasi penerapan Permen kumham 10 Tahun 2020. Karena over kapasitas di Rutan Surabaya masih diatas 400%.
- Penjelasan terkait isu peredaran Narkoba di Rutan Medaeng dan memintalangkah tegas?
- Penanganan Covid-19, harus ada transparansi upaya penanganan dan data yang terkonfirmasi dan korban yang ada ? Penyebab WBP terpapar Covid-19 dilapas/ rutan. Menyoroti sistem pembagian makanan yang berpotensi besar sebagai sumber penyebaran. Harus segera dilakukan kajian, sehingga nanti bisa dibuat pelajaran lapas/ rutan lain.
- WNA yang ingin masuk ke Indonesia khususnya Jatim secara ilegal. Sehingga TIMPORA harus melakukan inventarisasi dan pengawasan WNA di Jatim khususnya asal Tiongkok.
- Letak Lapas yang ditengah kota, mengusulkan untuk inventarisasi dan direlokasi.
- Terkait sulitnya komunikasi antara advokat dan kliennya di lapas/rutan selama pandemic Covid-19.
- Terkait Fungsi pelayanan publik khususnya AHU harus dipastikan tidak terganggu.
- Penjelasan terkait setelah pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan layanan HKI bisa menjadi pengungkit agar Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini agar penyederhanaan birokrasi dan kemudahan layanan diharapkan online dengan semangat UU Cipta Kerja. Seberapa besar langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menstimulasi pelaku usaha? Apakah sudah punya mapping terkait potensi yang ada?
- Kasus Harun Masikun menjadi pelajaran bagi Imigrasi Jatim. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki mulai dari sistem TI hingga integritas pegawai. Harus ada mitigasiresiko atas apa yang terjadi terkait lolosnya Harun Masiku.
- Apresiasi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang bisa mengurangi sedikit masalah overkapasitas. Namun, masih banyak PR yang harus diselesaikan karena persoalan overcrowded ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Kemenkumham. Tapi juga APH lain. Komunikasi dengan APH harus bisa dibangun untuk mencegah overkapasitas yang lebih besar.
- Dimana ada usulan untuk mengubah tanggungjawab WBP keKejaksaan. Namun, saat ini pihaknya memperjuangkan agar tetap menjadi tanggung jawab lapas. Sehingga, dia berharap harus ada strategi dari Kanwil Kemenkumham Jatim, terkait pemerataan jumlah WBP dilapas/ rutan. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi serta segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah over kapasitas di Rutan Medaeng.

Jawaban :

- Terkait Pondok Pesantren Imam Syafi'ie Tulungagung dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah dilakukan Penyampaian komunikasi pengasuh dari pondok pesantren Imam Syafi'ie Tulungagung masalah Pondok pesantren melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang Pendidikan dan tempat ibadah. Dalam perkembangannya sebagian warga disekitar pesantren tidak menyetujui adanya pembangunan sarana prasarana pesantren tersebut dengan alasan beda aqidah dengan mereka walau belum dapat dibuktikan, kemudian adanya perintah dari camat secara lisan untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan dipesantren dan dikuatkan dengan surat perintah Bupati nomor: 300/624/209/2020 tanggal 24 Juni 2020 sampai pondok pesantren memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pondok Pesantren mengalami kesulitan dalam proses pengurusan (IMB) karena ada penolakan sebagian warga dan tidak ada pengesahan persetujuan warga oleh kepala Desa. Pesantren diminta untuk melakukan sosialisasi terkait IMB yang sedang diajukan dan sosialisasi tidak dapat berjalan, sampai saat ini kurang lebih 7 bulan IMB tersebut tidak diproses. Fakta dilapangan dalam pertemuan Tim Yankomas dengan stake holder yang terkait diperoleh fakta bahwa IMB pondok pesantren belum diproses oleh Dinas Perizinan yang disebabkan oleh syarat berupa persetujuan dari warga masyarakat belum terpenuhi, sementara menurut pelapor lebih kurang 60 (enam puluh) warga sudah memberikan dukungan berupa tandatangan persetujuan namun Kepala Desa Tapan hanya mengesahkan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) orang yang menandatangani persetujuan, selebihnya tidak disahkan oleh Kepala Desa Tapan dan Keputusan Bupati Tulungagung untuk penghentian proses pembangunan Masjid di Pondok Pesantren tersebut sebelum adanya IMB.
- Terkait tindak lanjut penanganan kasus kewarganegaraan ganda di Tulungagung, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kanim Kelas II Non-TPI Blitar dengan hasil sebagai berikut; 1. Chuang Chung Him adalah Warga Negara Kanada yang juga memiliki permanent resident card Hong Kong. 2. Chuang Chung Him telah mengakui kesalahannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. 3. Kanim Kelas II Non TPI Blitar telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.
- Penentuan Lapas Super Maximum Security wajib mempertimbangkan beberapa syarat yaitu Struktur organisasi (eselonering), Struktur bangunan/sarana prasarana, SDM, Dukungan terhadap pengamanan (Polri/TNI), Culture Masyarakat, dan Dukungan transportasi yang memadai. Dari Analisa syarat-syarat diatas, Lapas Kelas III Arjasa, belum memenuhi syarat untuk dijadikan Lapas Super Maximum Security.
- Terkait evaluasi penerapan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penanganan over kapasitas dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim khususnya di Rutan Kelas I Surabaya telah dilaksanakan.
- Pelaksanaan tugas P4GN dilingkungan lapas/rutan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim telah membentuk satgas P4GN baik ditingkat kantor wilayah maupun UPT Pemasayarakatan.
- Kasus terpaparnya dari Lapas I Surabaya, awalnya ada narapidana yang berobat ke RSUD dengan diagnose DM (Diabetes Melitus). Dengan penurunan saturasi Oksigen, kemudian dilakukan rawat inap dan dilakukan pemeriksaan lainnya termasuk tes PCR/ swab dan baru diketahui hasilnya adalah positif. Karena sebelumnya sudah kontak dengan penghuni lainnya. Mengingat penyebaran virus covid-19 adalah melalui sistem pernapasan. Sehingga mudah sekali penularannya melalui aerosol, droplet, atau kontak langsung. Akhirnya siapa pun mudah tertular penyakit ini. Apalagi kondisi di Lapas sangat over kapasitas dan over crowded. Sistem pembagian makanan sudah diatur sedemikian rupa. Untuk pengiriman dan penyajian makanan sudah melewati pemeriksaan dan sudah mengikuti protokol kesehatan. Pengiriman makanan kedalam blok cukup dilakukan 1-2 orang saja, dengan dilengkapi APD yaitu masker dan sarung tangan. Selain itu, kebersihan petugas dapur dan pekerja dapur pun sudah diawasi oleh kasubid perawatan. Sehingga, meminimalkan

penularan Covid-19. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan Kesehatan secara berkala untuk petugas dan WBP yang menjadi pekerja dapur. Lapas juga sudah berkordinasi dengan dinkes, dan instansi terkait untuk dilakukan penyemprotan desinfektan disemua ruangan untuk pencegahan adanya virus covid19.

- Langkah-langkah relokasi satuan kerja yang berada ditengah kota antara lain: Memerintahkan Kepala UPT untuk melaksanakan pemetaan satuan kerja masing-masing; dan Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Hasil koordinasi ada beberapa lapas yang sudah mendapat bantuan lahan dari Pemerintah Daerah. Namun, belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran dan lokasi yang diberikan tidak memenuhi syarat.
- Selama pandemic Covid-19, Dirjen Pemasayarakatan telah mengeluarkan SE tentang penundaan sementara kunjungan langsung keluarga atau advokat/ penasehat hukum dan diganti dengan kunjungan secara virtual. Adapun pelayanan yang telah dilaksanakan secara virtual antara lain persidangan online, kunjungan online, pembinaan kepribadian dan kemandirian secara online dan penerimaan barang secara drive thru. Maka dari itu, komunikasi advokat dan kliennya difasilitasi dengan media daring.
- Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing termasuk Orang Asing Asal Tiongkok dilaksanakan pada masuk, berada dan berkegiatan di Indonesia/ Jawa Timur sampai keluar wilayah Indonesia / Jawa Timur Untuk meningkatkan dan mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing termasuk tenaga kerja asing di Wilayah Indonesia Kementerian Hukum dan HAM RI Cq.Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing mulai tingkat pusat, wilayah/ propvinsi, kabupaten/ kota sampai tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari instansi dan / atau Lembaga pemerintah yang mempunyai itu tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing (Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing) dan di Jawa Timur telah terbentuk sebanyak 706 Tim Pora baik tingkat wilayah/ propinsi, Kab/ Kota maupun tingkat Kecamatan.
- Pelayanan publik disegala bidang di Kanwil Kemenkumham Jatim masih berjalan dengan baik. Apalagi layanan AHU sudah menggunakan sistem online. Sehingga, masyarakat bisa mengakses dari rumah.
- Terkait Draft RUU Cipta Kerja melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri. Perlindungan Kekayaan Intelektual hanya dapat dicapai apabila Karya Kekayaan Intelektual tersebut didaftarkan. Karena itu untuk meningkatkan perlindungan KI atas material dan peralatan konstruksi hasil penelitian, diperlukan strategi promosi dan diseminasi terkait KI jenis Paten, yang manatelah dianggarkan dalam DIPA Program Kekayaan Intelektual Tahun 2021.
- Kami telah melakukan langkah-langkah: Sosialisasi program Jaringan Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (JaranKya -I).Salah satu programnya adalah menindak lanjuti insentif pendaftaran KI dari APBD Kab/Kota untuk UMKM dan UKM di Jatim. 2.Telah mendorong Kab/Kota di Jatim untuk menganggarkan insentif pendaftaran KI bagi masyarakat (UKM/ UMKM). 3.Membuat Pusat Layanan Terpadu KI di Kantor Wilayah.
- Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan maupun Pencegahan dan Penangkalan mengacu pada regulasi dan SOP yang berlaku. Pengawasan keimigrasian terhadap lalulintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga dilakukan dalam bentuk sistem teknologi Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (Sistem CAIPSS) yaitu serangkaian metode pengawasan yang menggunakan system teknologi keamanan penerbangan sipil dan layanan penumpang internasional untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing yang bertujuan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia,dan peredaran narkotika melalui lalu lintas orang dibandar udara.

- Peningkatan pelayanan keimigrasian dalam mengantisipasi RUU Cipta Kerja antara lain: 1. Mempelajari dan memahami RUU Cipta Kerja 2. Menginventarisir pelayanan keimigrasian yang terkait dengan RUU Cipta Kerja 3. Menyiapkan sarana dan SDM pendukung implementasi RUU Cipta Kerja
- Telah dilaksanakan MoU antara Kementerian Hukum dan HAM, Polisi dan BNNP terkait pencegahan, penindakan dan pemberantasan narkoba serta rehabilitasi pengguna narkoba. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah menginisiasi pembuatan Posko Terpadu P4GN di satuan kerja pemasyarakatan.
- Terhadap pelayanan paspor masyarakat, khususnya kelompok rentan (manula) saat akan menjalankan ibadah umroh/haji. Sehingga, ada priority service untuk masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM RI Cq.Direktorat Jenderal Imigrasi telah menawarkan Program Layanan Eazy Passport, dengan kegiatan melakukan Penawaran secara aktif dengan mengirim surat penawaran secara langsung kepada: a) Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta termasuk kepada kelompok Bimbingan Ibadah Haji/ Umroh; b) Institusi Pendidikan (sekolah/pesantren/asrama); c) Komunitas/ organisasi; dan d) Komplek perumahan/ apartemen. Khusus pelayanan paspor calon Jemaah Umroh tetap berkoordinasi dengan Kantor kementerian Agama setempat (Instansi yang memberikan rekomendasi). Layanan paspor calon Jemaah Haji 2020 telah dilaksanakan 100% sesuai quota yang ditetapkan.
- Kami telah melaksanakan klasifikasi WBP di Rutan Kelas I Surabaya, Melakukan Pemetaan UPT penampung dan melaksanakan pemindahan secara berkala ke UPTpenampung di Wilayah Jawa Timur. Pada periode September–Oktober 2020 ini, Rutan Kelas I Surabaya telah berangsur-angsur melakukan distribusi penghuni yang sudah mendapatkan putusan di Pengadilan tingkat pertama. Total ada 421 orang WBP yang sudah dipindahkan. Kami akan terus melakukan pemindahan WBP keseluruhan lapas/ rutan di Jatim. Peningkatan pelayanan pemberian hak WBP (remisi, asimilasi, CB, CMB dan PB).

II. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bapak Dr. Muhammad Dofir, SH,.MH pada tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

1. BIDANG ANGGARAN

1.1 Realisasi Anggaran

- Realisasi Anggaran Perprogram sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 sebesar Rp. 418.098.536.000, dan Total Realisasi sebesar Rp. 344.902.853.590 atau 82,49 %. Rekapitulasi laporan realisasi perprogram satuan kerja sampai oktober tahun 2020 jumlah keseluruhannya Rp. 84.953.769.603 91 atau 90 %.
- Program Prioritas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah ; Program prioritas pada tahun 2020 yang tercantum dalam DIPA antara lain Pelaksanaan TP4D, namun pelaksanaan TP4D dibekukan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-059/A/JA/03/2018 tentang perubahan atas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI
- Kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja di kejaksaan tinggi jawa timur adalah ;
 - 1) Kegiatan Jaksa Masuk sekolah dan Jaksa Menyapa tidak bisa dilaksanakan karena dalam pandemi Covid 19 tidak diperbolehkan mengumpulkan orang banyak.
 - 2) Tidak adanya sidang yang harus hadir di ruang Sidang namun dapat dilaksanakan secara daring (online) sehingga biaya pengawalan atau pengamanan terdakwa ke sidang PN tidak terserap anggarannya pada bidang Pidana Umum.

- 3) Dihapuskannya kegiatan TP4D sehingga anggaran TP4D dialihkan ke kegiatan lain sehingga mengurangi penyerapan anggaran pada bidang Intelijen dengan adanya pandemi Covid 19.
- 4) Koordinasi dalam pelaksanaan Revisi Anggaran tidak optimal misalnya untuk konsultasi revisi pergeseran anggaran antar Satker hanya melalui daring / online.

1.2 Kebutuhan Anggaran

- Kebutuhan Dukungan Anggaran pada tahun 2020 adalah;
 - 1) Perlunya tambahan anggaran penanganan perkara tindak pidana umum khususnya untuk satuan kerja yang penanganan perkaranya tinggi.
 - 2) Perlunya tambahan anggaran penanganan perkara tindak pidana khusus (korupsi) baik di tingkat Kejati maupun Kejari, karena tahun 2020 seluruh satker hanya mendapatkan anggaran untuk 1 perkara.
 - 3) Perlunya tambahan anggaran peningkatan sarana dan prasarana baik di Kejati maupun Kejari, khususnya peralatan dan mesin dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- Program Prioritas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2021 antara lain;
 - 1) Untuk program prioritas Tahun 2021 adalah pembangunan atau renovasi gedung / gudang barang bukti. Dengan adanya pembangunan atau renovasi gedung / gudang barang bukti diharapkan penanganan barang bukti pada Kejaksaan lebih baik dan bisa meningkatkan optimalisasi PNBK Kejaksaan di 31 Kejari di Jawa Timur 31 Kejari di Jatim mendapat pagu anggaran masing – masing Rp. 200.000.000,- yang merupakan hasil dari penggunaan PNBK Kejaksaan RI dengan total pagu Rp. 6.200.000.000,-
 - 2) Kebutuhan Dukungan Anggaran dalam Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi
 - 3) Program Sarana dan Prasarana yaitu :
 - Kendaraan operasional untuk penyuluhan hukum pada Kejari.
 - Kendaraan operasional untuk eksekusi barang bukti pada Kejari.
 - Peralatan kegiatan Operasi Intelijen Kejaksaan.
- Program Dukungan Manajemen adalah agar terlaksananya operasional kegiatan pegawai terutama anggaran tunjangan kinerja untuk insentif bagi Satker yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta Program Penanganan Perkara : Agar terlaksananya penanganan perkara yang saat ini harus melalui daring / online antara lain tersedianya Jaringan Internet yang bandwidth nya tinggi dan komputer ataupun laptop dalam mendukung kegiatan sidang online.

2. BIDANG PENGAWASAN

2.1 Penanganan Tindak Pidana Khusus

- Penyelamatan Aset berupa Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di Kelurahan Karang Pilang Kec. Karang Pilang Seluas 38.985 M² dan uang konsinyasi sebesar Rp. 6.392.100.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah). Estimasi/Taksir tanah seluas 38.985 M² setara dengan nilai Rp. 194.925.000.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Penyelamatan Aset di Jalan Kalisari I Nomor 5-7 Surabaya seluas 566 M² dan di Jalan Sariboto II Nomor 1-3 Surabaya seluas 156 M². Estimasi/Taksir tanah seluas 566 M² setara dengan nilai Rp. 2.830.000.000,- Estimasi/Taksir tanah seluas 156 M² setara dengan nilai Rp. 780.000.000,- Total = Rp. 3.610.000.000,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)
- Penyelamatan keuangan Negara berupa Pembayaran Klaim Bank Garansi Jaminan Uang Mua sebesar Rp. 4.078.666.962,- (empat milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang diajukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya kepada PT. Bank Syariah Mandiri Region Office Surabaya.

- Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Floating Dock dengan kapasitas 8.500 TLC di PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun 2015, dengan kerugian negara sebesar Rp. 63 Miliar.
- Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun 2015, dengan kerugian negara sebesar Rp. 63 Miliar. Perkembangan :
 - 1) An. Terdakwa RIRY SYERIED JETTA - PN Tipikor : Bebas - Mahkamah Agung: Penjara 8 (delapan) tahun, Denda Rp. 500 juta, Uang Pengganti Rp. 132 juta
 - 2) An. ANTONIUS ARIS SAPUTRO - PN Tipikor : Penjara 16 (enam belas) tahun, Denda Rp. 1 Milyar, Uang Pengganti Rp. 61 Milyar. - PT : Penjara 8 (delapan) tahun, Denda Rp. 1 Milyar, Uang Pengganti Rp. 61 Milyar. - MA : masih tahap Kasasi
 - 3) An. ADRI SIWU - PN Tipikor : Penjara 10 (sepuluh) tahun, Denda Rp. 1 Milyar - PT : Menguatkan Putusan PN Tipikor - MA : masih tahap Kasasi
- Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bansos APBD Kab. Jember TA 2015. Kasus Posisi: Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, DPRD Jember menganggarkan Dana Hibah Bansos sejumlah Rp. 226.931.921.000,- Dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan pemberian dana hibah bansos tersebut dilakukan secara melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). 6. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Tahun 2016-2019. Kasus Posisi: Bahwa pada tahun 2017 sampai 2019 Bank Jatim Cabang Kepanjen memberikan kredit kepada beberapa debitur yang mana dalam proses pengajuan dan pemberian kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 173.221.040.805,- (seratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
- Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Januari – September 2020, tahap Penyelidikan sebanyak 90 perkara, Kejati sebanyak 22 perkara, Kejari sebanyak 68 perkara dan Tahap Penyidikan sebanyak 59 perkara, Kejati sebanyak 4 perkara, Kejari sebanyak 55 perkara. Tahap Penuntutan sebanyak 64 perkara, Kejati sebanyak 2 perkara, Kejari sebanyak 62 perkara, Tahap Eksekusi sebanyak 76 perkara.
- Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Pajak, Cukai, Kepabeanan) Januari s/d September 2020 yaitu Tindak Pidana Pajak Tahap Penyelidikan (SPDP) sebanyak 22 perkara, Tahap Penuntutan sebanyak 12 perkara. Tindak Pidana Cukai Tahap Penyelidikan (SPDP) sebanyak 12 perkara, Tahap Penuntutan sebanyak 9 perkara. Tindak Pidana Kepabeanan Tahap Penyelidikan (SPDP) sebanyak 1 perkara, Tahap Penuntutan sebanyak 0, Tahap Eksekusi sebanyak 18 perkara.
- Data Penyelamatan Keuangan Negara Januari – September 2020
Data Penyelamatan Keuangan Negara Periode Januari s/d September 2020 sebesar Rp 432.104.171.101,- (empat ratus tiga puluh dua milyar seratus empat juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus satu rupiah)
- Hambatan dalam penanganan perkara
Hambatan dalam penanganan perkara antara lain terkait proses eksekusi, yaitu kelambanan eksekusi putusan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi akhir-akhir ini sering menimbulkan persoalan dalam praktik. Sumber masalahnya terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada Jaksa selaku eksekutor. Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dilakukan eksekusi jika hanya dengan petikan putusan. Masalah eksekusi ini tidak terlepas dari sistem administrasi minutasasi (pembuatan salinan putusan) yang berlaku di Mahkamah Agung karena proses minutasasi putusan membutuhkan waktu yang lama serta tidak adanya aturan jangka waktu penyelesaian minutasasi putusan, khususnya minutasasi putusan di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi dalam proses eksekusi yaitu Terpidana melarikan diri atau tidak ditemukan (DPO) serta Terpidana yang sedang sakit (surat sakit dari dokter)

Untuk Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di Surabaya, sehingga memerlukan waktu, biaya dan personil yang cukup banyak terutama bagi satuan kerja yang jaraknya jauh dari Surabaya Kondisi saat ini karena wabah Covid 19 menjadi kendala dalam proses penanganan perkara

- Data Perkara tindak pidana khusus yang masih menjadi sisa: Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan Program Kali Bersih (PROKASIH) dan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Komposting pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Magetan Tahun 2013 dan 2014 (Kejaksaan Negeri Magetan) Ket : - Penyidikan dari Polres Magetan - Tahap I (2019) sebanyak 5 berkas dan 5 Tersangka - P-21 (2019) sebanyak 2 berkas, sudah dilakukan penuntutan dan diputus PN Tipikor. Saat ini masih tahap upaya hukum kasasi. - 3 Berkas masih berada di Polres (P-19) Hambatan yaitu Penyidik belum menyerahkan kembali berkas perkara yang telah diberikan petunjuk (P19).

3.1 Penanganan Tindak Pidana umum

- “Perkara Memiles” Perusahaan di bidang Advertising (periklanan) yang awalnya bernama Memiles Vendor berubah menjadi Memiles Wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang keperluan pernikahan dengan dengan sistem Memiles Vendor. Memiles melakukan perdagangan dengan aplikasi Memiles memperdagangkan slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses oleh member dan memberikan tawaran hadiah, komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles Hadiah, komisi dan bonus tersebut hanya didapatkan dengan merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau top up minimal Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000.000,-. Adapun hal tersebut dilakukan dalam bentuk usaha piramida yang tidak dibenarkan dan tanpa ijin dari Menteri Perdagangan. Investasi melalui MeMiles begitu menggiurkan. Sederet bonus berlimpah di depan mata memancing para member berani memutarakan duitnya. Membuat mata dan pikiran mereka terhanyut dengan jebakan hadiah. Tanpa sadar duit mereka sedang diputar. MeMiles di bawah naungan PT Kam and Kam. Perusahaan investasi ini cukup mulus menjalankan aksi. Baru berdiri 8 bulan saja, aset mereka pegang sudah mencapai Rp760 miliar lebih. Kemudian berhasil mengumpulkan member sebanyak 264 ribu orang.

3. SESI PENDALAMAN

Pada sesi pendalaman perwakilan anggota TIM Komisi III menanyakan beberapa hal sebagai berikut;

- Terkait Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum di daerah tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti ada laporan yang kami terima mengenai Kepala Desa dan Kepala Sekolah menjadi sasaran karena perkara yang bernilai jutaan rupiah.
- Terkait Otnum LSM yang mengatasnamakan KPK yang kemudian meminta data mengenai pembangunan desa atau dana BOS dan yang menjadi pertanyaan setelah oknum LSM tersebut mendapatkan data, kemudian kepada desa dan kepala sekolah tersebut dipanggil oleh pihak Kejaksaan. Apakah hanya sebuah kebetulan atau memang sudah dipersiapkan sebelumnya?

Jawaban :

- Penjelasan terkait LSM yang mengatasnamakan KPK, maupun LSM lainnya Khususnya mengenai Dana Bos yang dilaporkan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. LSM “ KPK” Pasundan melalui pesan Ketua KPK Pasundan DPD Bojonegoro yang ditujukan kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 September 2020 pukul 12.11 Wib, telah kami lakukan pengecekan kepada Badan Kesbangpol bahwa LSM KPK Pasundan tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Bojonegoro. Adapun 2 LSM sebagaimana tersebut diatas, sepanjang tahun 2020 tidak ada menyampaikan Laporan Pengaduan terkait Dana Bos maupun Kepala Desa. Kejaksaan Negeri Bojonegoro secara sungguh sungguh dan serius menyikapi adanya oknum LSM yang memanfaatkan “menjual” nama lembaga Kejaksaan Negeri Bojonegoro secara umum ataupun nama pegawai Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dari hasil

koordinasi Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Polres Bojonegoro yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan oknum Kejaksaan yang bekerjasama dengan anggota LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, setelah kami telusuri dan melakukan pengecekan kepada oknum kejasakaan yang namanya "dicatut" dan kami pastikan tidak ada keterlibatan dan sangkut paut dengan LSM GMBI tersebut, telah berhasil mengamankan/ menangkap anggota LSM GMBI atas nama: Putut Sugiarto SE Bin Sugeng dan Kustiyanto Bin Kamit berikut barang bukti uang hasil pemerasan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 , ketika dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, kami selaku Kajari Bojonegoro telah menanyakan secara langsung kepada para tersangka diakui oleh para tersangka bahwa benar para tersangka telah mencatut nama oknum Kejaksaan Negeri Bojonegoro An. Fadil untuk melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. 2 orang terdakwa Putut Sugiarto SE Bin Sugeng dan Kustiyanto Bin Kamit, telah diabacakan agenda Tuntuta Pidana terhadap keduanya dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Adanya warga masyarakat yang berpotensi melakukan "pemerasan" kepada Kepala Desa Trucuk yang saat itu bidang Intelijen sedang melakukan klarifikasi kepada perangkat desa atas laporan pengaduan masyarakat terkait "ADD untuk pembangunan jalan paving", bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro melalui Bidang Intelijen yang melakukan penanganan laporan tersebut memastikan secara sungguh-sungguh dalam melakukan klarifikasi telah dilakukan secara profesional, memberikan saran untuk mengajukan pembinaan kepada inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro membuka pintu apabila diminta untuk melakukan penyuluhan hukum.
- Telah kami sampaikan kepada Kepala Desa Trucuk, apabila ada oknum/ orang pribadi/LSM yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk melakukan pemerasan, agar segera melaporkan kepada Bidang Intelijen dan juga telah kami sarankan agar semua komunikasi (percakapan/pesan WA) yang pernah ada dari oknum pribadi/LSM yang berpotensi melakukan "pemerasan" untuk disimpan sebagai petunjuk awal jika dikemudian hari terdapat perbuatan-perbuatan yang menakut-nakuti Kepala Desa guna mendapatkan keuntungan. Sepanjang tahun 2020 , Kejaksaan Negeri Bojonegoro melalui program Jaga Desa kami telah melakukan Penyuluhan Hukum / Pembinaan kepada Desa sebelum masa pandemi Covid-19, dimasa awal pandemi Covid-19 sempat terhenti untuk melakukan penyuluhan hukum mengingat masifnya pergerkaan penyebaran virus Covid-19, namun demikian dengan adanya pola hidup new normal saat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dari Pemerintah, Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan semangat menjaga Desa telah melakukan /rencana penyuluhan hukum. Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melaksanakan bimbingan kepada Kepala Sekolah (sebagai Narasumber) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Koordinasi Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis , tanggal 09 sampai dengan tanggal 10 September 2020 diikuti para Kepala Sekolah sejumlah 200 orang.
- Kejaksaan Negeri Bojonegoro secara umum, mengingatkan agar para kepala sekolah dalam penggunaan Dana BOS dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada serta juknis pelaksanaannya. Kejaksaan Negeri Bojonegoro kami sampaikan telah secara aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat atas setiap adanya permasalahan - permasalahan yang ada di desa.
- Terkait pengelolaan/ pemanfaatan Tanah Kas Desa Melihat belum adanya keseragaman dalam pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan langkah2 dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

untuk melakukan sosialisasi dan penertiban atas pemanfaatan Tanah Kas Desa yang tidak sesuai.

- Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh warga masyarakat Kejaksaan Negeri Bojonegoro bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro telah bersepakat untuk melaksanakan sosialisasi dalam hal penertiban Tanah Kas Desa oleh warga masyarakat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemerintah Desa sebagai bentuk pelaksanaannya, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan sampling di Desa Sidomulyo dan dari hasil identifikasi diketahui sebanyak 263 KK menguasai Tanah Kas Desa dengan luas keseluruhan + 10 Ha terbagi di 5 dusun Harapan dari kegiatan ini, tidak hilangnya aset Pemerintah Desa berupa Tanah Kas Desa, yang memang sudah sejak lama dikuasai oleh masyarakat hingga dugaan telah adanya perpindahan tangan (jual beli) atas Tanah Kas Desa tersebut.

III. PENJELASAN DENGAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

1. KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

1.1 BIDANG ANGGARAN

1.1.1 Realisasi Anggaran

- Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Surabaya sampai bulan oktober tahun 2020 sebesar Rp.53.030.302.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 37.953.828.683,- atau 71,57 %.
- Belanja Modal antara lain Peralatan dan Mesin PC Komputer dan Scanner senilai Rp 35.000.000,- sudah terlaksana dengan realisasi 34.380.000,-; Pengadaan Peratan fasilitas perkantoran berupa Meja Kerja, Kursi Kerja, Filling Cabinet, Lemari kaca dan Sound System sebesar Rp 128.800.000,- dalam proses pelaksanaan bersamaan dengan Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor; Renovasi 2 (dua) Rumah Dinas sebesar Rp 1.845.999.000,- dalam proses pengerjaan fisik dengan realisasi sampai dengan saat ini sebesar Rp 971.991.440,-;
- Renovasi dan Perluasan Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp 5.896.035.000,- dalam proses pengerjaan fisik dengan realisasi sampai dengan saat ini sebesar Rp 776.236.848,-.
- Pagu Dan Realisasi DIPA 03 Anggaran Tahun 2020 Per 12 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya Pagu anggaran Rp.638.668.000, Realisasi Rp.365.895.028 atau 57 %.
- Adapun kendala yang dihadapi antara lain ;
 - 1) Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan penyerapan untuk pembinaan dan pengawasan tidak dapat terserap secara maksimal;
 - 2) Untuk perluasan dan renovasi gedung kantor terjadi pengurangan anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dari Rp 16.232.889.000,- menjadi Rp 7.905.994.000,-
 - 3) Adanya pengurangan anggaran untuk DIPA 03 dikarenakan Pandemi Covid 19 dari Rp 830.018.000,- menjadi Rp 638.668.000,- sehingga kegiatan pembinaan tenaga teknis tidak dapat dilakukan.

1.1.2 Kebutuhan Anggaran

- Pengadilan Tinggi Surabaya pada Tahun 2021 DIPA pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, dimana pada DIPA ini terdapat 2 (dua) program sebagai berikut :
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan pagu anggaran sebesar Rp 49.228.223.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.114.395.000,- (delapan milyar seratus empat belas juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum, dimana pada DIPA ini terdapat 1 (satu) program

sebagai berikut: Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.620.460.000,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Adapun kegiatan yang dibiayai dari program ini meliputi :
 - 1) Kegiatan penyelesaian perkara pidana tingkat banding di wilayah Jawa Timur;
 - 2) Kegiatan penyelesaian perkara pidana korupsi tingkat banding di wilayah Jawa Timur;
 - 3) Kegiatan pembinaan/pengawasan pelayanan publik oleh tingkat banding ke tingkat pertama;
 - 4) Kegiatan peningkatan kualitas tenaga teknis bagi panitera dan juru sita.

1.2 BIDANG PENGAWASAN

1.2.1 Penanganan Perkara

- Data perkara perdata sisa tahun 2019 sebanyak 173 perkara, Perkara Masuk sebanyak 621 perkara, Perkara Putus 659 Perkara, Proses 135 Perkara.
- Pidana Sisa Tahun 2019 143 Perkara, Perkara masuk Tahun 2020 1223 Perkara, Putus 1298 perkara, Proses 68 Perkara.
- Tipikor di Pengadilan Tinggi Surabaya Sisa perkara tahun 2019 2 perkara, masuk tahun 2020. 32 perkara, putus 31 perkara, proses 3 perkara.
- Perkara yang menonjol di Pengadilan Tinggi Surabaya yakni berjumlah 10 perkara dengan ancaman hukuman pidana mati/ seumur hidup, Tindak kejahatan narkoba 7 perkara, Pembunuhan Berencana 2 Perkara, Pencurian dengan kekerasan akibat mati 1 perkara.
- Penjelasan terkait data mengenai hakim dan panitera yang bermasalah serta koordinasi yang selama ini dilaksanakan dengan Komisi Yudisial. Dari bulan Januari s/d September 2020 : Apabila Komisi Yudisial RI akan melakukan pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, selalu koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya. Petikan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial RI, disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Surat hasil pemeriksaan Komisi Yudisial RI yang diterima Pengadilan Tinggi sebagai berikut : 34 Surat berkaitan dengan Hakim dan 1 Surat berkaitan dengan Panitera.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang *online*. Berbagai hal yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 maka Persidangan dilaksanakan sesuai dengan protokol yang berlaku dimana :
 - 1) Persidangan perkara perdata dilakukan dengan cara biasa, online maupun dengan cara gugatan eCourt
 - 2) Persidangan perkara pidana biasa / khusus dilaksanakan secara online/teleconference;
 - 3) Persidangan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dilaksanakan secara online/teleconference dan apabila dikehendaki, dilakukan secara langsung sebagaimana Instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Tipiring Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Timur.
- Pelaksanaan sidang online/teleconference sebagaimana dimaksud pada poin 2 membutuhkan sarana dan prasarana tambahan yang kadangkala sering terjadi gangguan sehingga menghambat keberlangsungan persidangan. Adapun hambatan/kendala yang dimaksud adalah :
 - 1) Keterbatasan ruang sidang menyebabkan persidangan perkara menjadi menumpuk karena terjadi antrian menunggu giliran pemakaian ruang sidang yang dilengkapi dengan fasilitas Teleconference

- 2) Kurangnya Sarana dan prasarana web camera dan infocus
- 3) Koneksi Jaringan Internet dari Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Polres kurang bagus sehingga menyebabkan suara tidak jelas, seperti di PN Blitar sering skorsing jalannya persidangan karena ada hambatan di jaringan
- 4) Peralatan sound system/speaker masih kurang memadai, sehingga kadangkala suara yang dihasilkan kurang jelas

2. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

2.1 BIDANG ANGGARAN

- Penjelasan terkait Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal total sejumlah Rp. 250.304.643.000,- (dua lima puluh miliar tiga ratus empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) satker di Jawa Timur.
- Realisasi Anggaran DIPA 01 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 204.395.368.294,- (dua ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) satker di Jawa Timur.
- Persentase Penyerapan / Realisasi Anggaran DIPA 01 terhadap Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dan Lainnya Mahkamah Agung RI untuk 38 (tiga puluh delapan) Satker sampai dengan bulan Oktober sebesar 82% (delapan puluh dua) persen.
- Pagu DIPA 04 Pengadilan Agama Se Jawa Timur. Program Prioritas berupa Pembebasan Biaya Berperkara (Prodeo), Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang Terpadu dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan sejumlah Rp. 3.475.981.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) satker di Jawa Timur.
- Realisasi Anggaran DIPA 04 sampai dengan bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 2.791.909.962,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) untuk 38 satker di Jawa Timur; Persentase Penyerapan / Realisasi Anggaran DIPA 01 untuk 38 (tiga puluh delapan) Satker sampai dengan bulan Oktober sebesar 80% (delapan puluh) persen.
- Kendala yang masih dihadapi dalam capaian target kinerja anggaran tersebut sebagai berikut :
 - 1) Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak terjadinya revisi anggaran untuk anggaran kebutuhan Covid-19 yang seharusnya dalam target kinerja sudah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan terkendala oleh revisi anggaran tersebut.
 - 2) Capaian realisasi anggaran terhadap kinerja sedikit terhambat oleh program revisi anggaran terkait Protokol Kesehatan.
 - 3) Pembatasan jam pelaksanaan pengajuan pencairan anggaran karena kondisi Covid-19 sehingga berdampak kurang maksimal terhadap penyerapan anggaran tersebut.

2.2 BIDANG PENGAWASAN

- Perkara yang menonjol yang terjadi sejak diberlakukannya Undang- Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang batasan usia perkawinan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun. Yang diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Oktober 2019. Menjadikan perkara Dispensasi Perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Agama se Jawa timur semakin meningkat.
- Untuk perkara dispensasi kawin tahun 2019 diterima 6.171 perkara diputus 5.766 perkara dan sisa 405 perkara.

- Pada tahun 2020 sampai pada bulan September 2020 sebanyak 12.815 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 12.238 perkara dan yang masih belum diselesaikan sebanyak 577 perkara. Berdasarkan hal tersebut maka permohonan Dispensasi kawin naik 122 %. Dengan jumlah permohonan Dispensasi Kawin yang meningkat menunjukkan masyarakat sadar hukum.
- Untuk Hakim dan Panitera di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak ada masalah, sehingga tidak pernah berkorespondensi dengan Komisi Yudisial.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebatas pemeriksaan saksi, sedangkan untuk para pihak masih bertatap muka sebagaimana diatur dalam SEMA 1 tahun 2020 yang diubah terakhir dengan SEMA NO. 9 tahun 2020. Adapun kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian adalah semakin meningkatnya perkara perceraian khususnya Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2020 sampai bulan September 2020 sebanyak 6.265 perkara, rata-rata setiap bulan 1.316 perkara dan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA jumlah perkara yang diterima tahun 2020 sampai bulan September 2020 sebanyak 3.925 perkara, rata-rata setiap bulan 575 perkara dengan kondisi gedung yang belum prototype dan ruang tunggu yang sempit, maka menjadi kendala untuk menerapkan physical distancing, oleh karena itu mohon kiranya Komisi III DPR RI untuk memberikan fasilitas pengadaan gedung baru bagi kedua Pengadilan Agama tersebut.
- Strategi Penanganan Perkara antara lain;
 - 1) Adanya aplikasi-aplikasi yang sudah dilakukan untuk mempercepat penanganan perkara, seperti Aplikasi yang telah terintegrasi dengan Mahkamah Agung RI : SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Direktori Putusan MA RI, KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional), SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI), SIMAK-BMN. Aplikasi internal yang digunakan Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
 - 2) Aplikasi Pelaporan dan data Statistik Perkara, SIMONA (Sistem Monitoring Akta Cerai dan Validasi Data), SITARA (Sistem Informasi Transparansi Perkara). Dengan aplikasi tersebut para pihak dapat memantau data dari pendaftaran sampai terbit akta cerai, bahkan jika putusan sudah berhasil diaupload ke Direktori Putusan via SIPP maka para pihak dapat mengunduhnya).
- Pelaksanaan One Day Minute dan One Day Publish di Peradilan Agama se Jawa Timur.
- Telah dilakukan Akreditasi terhadap seluruh PA. Se Jawa Timur dan PTA Jawa Timur.
- Penekanan penyelesaian perkara tingkat pertama maksimal 5 (lima) bulan dan tingkat banding maksimal 3 (tiga) bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014.
- Semua Pengadilan Agama telah menerapkan e-Court dalam penanganan perkara.
- Keadaan perkara pada Pengadilan Agama se Jawa Timur, baik sisa perkara tahun 2019 maupun perkara yang diterima dan diputus hingga akhir bulan September tahun 2020 dapat diperinci sisa tahun yang lalu (2019) 8.918 perkara dan diterima tahun 2020 (Januari – September) sebanyak 97.652 Perkara.
- Jenis Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Se Jawa Timur Januari – Desember Tahun 2019, Pengadilan Agama se Jawa Timur pada tahun 2019 telah menerima sebanyak 121.783 perkara.
- Januari – September Tahun 2020 Pengadilan Agama se Jawa Timur hingga akhir bulan September tahun 2020 telah menerima sebanyak 97.652 perkara.
- Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Se Jawa Timur Januari – Desember Tahun 2019 Berdasarkan data tersebut di atas, hingga akhir bulan Desember 2019 Pengadilan Agama Se Jawa Timur telah menangani 135.743 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13.960 perkara ditambah perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 121.783 perkara, dan telah

menyelesaikan perkara tersebut sebanyak 126.825 perkara yakni sebanyak 6.849 perkara dicabut dan 117.315 perkara diputus.

- Januari – September Tahun 2020, Berdasarkan data tersebut di atas, hingga akhir bulan September 2020 Pengadilan Agama Se Jawa Timur telah menangani 106.570 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 8.918 perkara ditambah perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 97.652 perkara, dan telah menyelesaikan perkara tersebut sebanyak 92.473 perkara yakni sebanyak 5.294 perkara dicabut dan 85.295 perkara diputus.
- Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Se Jawa Timur dari 117.315 perkara yang diputus pada tahun 2019 terdapat 71.122 perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat.
- Perkara yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat saat ini selain perkara perceraian, perkara yang masih menonjol dan menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah:
 - 1) Perkara yang menyangkut harta benda (kebendaan) yaitu mengenai gugat Waris dan gugatan Harta Bersama / gono-gini.
 - 2) Perkara yang menyangkut regulasi pemerintah mengenai usia pernikahan yakni perkara Dispensasi Kawin dan perkara Itsbat Nikah.
 - 3) Perkara yang menjadi perhatian masyarakat di media sosial yakni perkara Ijin Poligami, dan tentu saja perkara Ekonomi Syariah.
- Perkara yang menonjol di peradilan agama yang diterima dan diputus sampai September tahun 2020 ini, adalah: Gugatan perceraian (Cerai Gugat) yang diterima sejumlah 52.269 perkara dan diputus sebanyak 45.515 perkara; Permohonan talak (Cerai Talak) yang diterima sejumlah 22.202 perkara dan diputus sebanyak 18.751 perkara; Gugatan Harta Bersama yang diterima sejumlah 188 perkara dan diputus sebanyak 103 perkara; Gugatan Waris (Kewarisan) yang diterima sejumlah 204 perkara dan diputus sebanyak 59 perkara; Gugatan Ekonomi Syariah yang diterima sejumlah 60 perkara dan diputus sebanyak 24 perkara.
- Permohonan Itsbat Nikah yang diterima sejumlah 4.201 perkara dan diputus sebanyak 3.614 perkara.
- Permohonan Dispensasi Kawin yang diterima sejumlah 12.995 perkara dan diputus sebanyak 12.238 perkara;

3. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

3.1 BIDANG ANGGARAN

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.862.281.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.441.000,- (Dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Oktober 2020 dapat kami sajikan dalam matriks Realisasi Anggaran sebagai berikut :

| No. | Kode Satker | Nama Satker | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
|------------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| DIPA 01 : | | | | | |
| 1. | 548940 | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya | 13.692.629.000,- | 11.897.281.271,- | 86,89% |
| DIPA 05 : | | | | | |
| 1. | 548941 | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya | 250.441.000,- | 80.132.570,- | 32,00% |

- Program Prioritas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah satunya mendukung salah satu program prioritas Bapak Presiden RI yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik bagi Aparatur Sipil Negara pada Bidang Kepaniteraan (Teknis) dan Kesekretariatan (Non Teknis), dengan harapan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing Aparatur Sipil Negara sehingga memberi manfaat pada peningkatan kinerja. Namun demikian kegiatan bimbingan teknis dimaksud, baik di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan tidak dapat dilaksanakan adanya dampak dari Pandemi Covid -19, dan agar tidak mengganggu terhadap realisasi dan capaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung maka telah dilakukan revisi anggaran salah satunya diperuntukan prioritas kebutuhan pencegahan penyebaran covid-19.

3.1.1 Dukungan Anggaran

- Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi untuk peningkatan upaya optimalisasi tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut:
 - 1) Perlu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, seperti : laptop untuk operasional kesekretariatan dan Panitera Pengganti, personal computer, printer warna, printer laserjet, TV LED, Scanner, mesin penghancur kertas, handycam, camera drone, sound system outdoor, sound system indoor;
 - 2) Perlu pengadaan AC Split dan Genset beserta Rumah Genset;
 - 3) Perlu pengadaan meubelair bagi Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Pegawai;
 - 4) Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Dinas.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima Pagu Anggaran sementara (masih dalam proses penyusunan) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.806.743.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 267.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan yang dibiayai dari program ini adalah Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi untuk peningkatan upaya optimalisasi tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :
 - 1) Perlu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
 - 2) Perlu pengadaan AC Split dan Genset beserta Rumah Genset.
 - 3) Perlu pengadaan meubelair bagi Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Pegawai.
 - 4) Rehabilitasi dan Renovasi Rumah Dinas.

3.2 BIDANG PENGAWASAN

3.3.1 Penanganan Perkara

- Perkara banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan bulan September 2020, Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 37 Perkara, Perkara Masuk sebanyak 180 Perkara, Perkara Putus sebanyak 192 Perkara, Perkara Cabut sebanyak 1 Perkara dan Sisa perkara sebanyak 24 Perkara.
- Perkara Masuk Tahun 2020 yang terbanyak adalah jenis perkara Pertanahan sebanyak 57 Perkara, Kepegawaian sebanyak 52 Perkara, Lain-lain meliputi :
 - Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa dan Kepala Desa dan PILKADES sebanyak 53 Perkara
 - Surat Keterangan Pengganti ijazah sebanyak 1 Perkara
 - Surat Keterangan Tanah Letter C sebanyak 3 Perkara
 - Pemberhentian Siswa Akademi Kepolisian sebanyak 2 Perkara
 - Surat Keterangan Akte Kelahiran/Kelahiran Catatan Sipil sebanyak 1 Perkara
 - Penangguhan Upah Minimum Kabupaten sebanyak 1 Perkara

- Hasil Seleksi CPNS sebanyak 1 Perkara
- Pemberhentian PNS dengan hormat dengan tanpa Hak Pensiun sebanyak 1 Perkara.
- Jenis Perkara yang dicabut Pengangkatan/Pemberhentian perangkat Desa ada 2 Perkara.
- Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2020 tidak ada yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan. Untuk sisa perkara tahun 2019 sebanyak 37 perkara seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.
- Perkara Gugatan Tingkat I (Gugatan PILKADA) Dalam Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima Gugatan PILKADA yaitu :
 - 1) No.1/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY - dicabut 1 April 2020.
 - 2) No.2/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY- Putus dengan amar Gugatan tidak diterima tanggal 15 September 2020.
 - 3) No.3/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY – Putus dengan amar Gugatan tidak diterima tanggal 22 September 2020.
 - 4) No.4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY – proses masih berjalan.
- Terdapat 7 Pengadu / Pelapor dalam 7 Perkara melibatkan 18 Hakim terdiri dari 7 Majelis Hakim dan 4 Panitera Pengganti melanggar kode etik semuanya koordinasi dengan Bawas MARI dan Komisi Yudisial.
- Sidang online di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya . belum ada. Dalam rangka memenuhi Protokol Kesehatan mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI , tanggal 7 September Nomor 9 Tahun 2020. , Maka Para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengunjung Sidang PILKADA telah melaksanakan Protokol Kesehatan dalam Tatanan Normal Baru (New Normal).

4. KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

4.1 BIDANG ANGGARAN

4.1.1 Realisasi Anggaran

- Pagu Anggaran pada Januari s.d Oktober Tahun 2020 sebesar Rp. 8.384.198.000,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 7.053.011.007,- atau 84.12 %. Sebagaimana tabel dibawah ini;

| No | Program Prioritas | Uraian | Pagu | Realisasi | % |
|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-------|
| A | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (005.01.01) | DIPA BUA (01)_TAHUN 2020 | 8.033.748.000,- | 6.752.558.634,- | 84,05 |
| | | Belanja Pegawai | 5.365.845.000,- | 4.488.619.228,- | 83,65 |
| | | Belanja Barang Operasional | 2.345.353.000,- | 1.998.529.200,- | 85,21 |
| | | Belanja Barang Non Operasional | 322.550.000,- | 265.410.206,- | 82,29 |
| B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA (005.01.02) | Belanja Modal | 95.000.000,- | 92.727.273,- | 97,61 |
| TOTAL DIPA 01 | | | 8.128.748.000,- | 6.845.285.907,- | 84,21 |
| C | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (005.01.02) | DIPA DITJENBADILMILTUN (05)_TAHUN 2020 | 255.450.000,- | 207.725.100,- | 81,32 |
| | | Belanja Barang | 255.450.000,- | 207.725.100,- | 81,32 |
| TOTAL DIPA 01 DAN DIPA 05 | | | 8.384.198.000,- | 7.053.011.007,- | 84,12 |

- Kendala-kendala dan Hambatan yang dihadapi adalah :

- 1) Rendahnya penyerapan anggaran perjalanan dinas dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* dimana kondisi saat ini mengharuskan semua kegiatan menggunakan sistem daring (*online*).
- 2) Tidak tersedianya anggaran khusus untuk mendukung sistem daring tersebut.
- 3) Tidak tersedianya anggaran khusus untuk penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi *Covid 19*
- 4) Tidak tersedianya anggaran guna mendukung Pembangunan Zona Integritas baik untuk menuju WBK ataupun WBBM
- 5) Perangkat dan sistem jaringan pengolah data yang kurang *support* (mulai dari *bandwidth* yang minim, perangkat pengolah data yang spesifikasinya sudah tidak *support* serta tidak adanya mata anggaran khusus untuk sewa *host*) dengan kebutuhan saat ini dimana banyak kegiatan/pertemuan yang dilaksanakan secara daring (*online*).
- 6) Rendahnya penyerapan anggaran perjalanan dinas (dalam rangka sidang keliling) dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* dimana kondisi saat ini mengharuskan semua kegiatan (sidang) menggunakan sistem daring (*online*).

4.1.2 Dukungan Anggaran

- Kebutuhan Anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah ;
 - 1) Anggaran mendukung sistem daring (Sewa *host* dan penambahan *bandwidth*).
 - 2) Anggaran penerapan protokol kesehatan menghadapi pandemi *Covid -19*.
 - 3) Anggaran dukungan sarana dan prasarana guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)
 - 4) Anggaran untuk Pengadaan Perangkat dan sistem jaringan pengolah data yang *support* dengan kebutuhan sistem daring (*online*) dan kegiatan lainnya yang berbasis teknologi informasi (TI).
 - 5) Anggaran untuk mendukung sistem daring/sidang *online* (Sewa *host* dan penambahan *bandwidth*).

4.2 BIDANG PENGAWASAN

4.2.1 Penanganan Perkara

- Data Perkara menonjol di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020 (Tingkat Pertama) sebagaimana tabel dibawah ini;

| PERKARA | SISA AWAL | MASUK | PUTUS | SUDAH BHT | SISA AKHIR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TINGKAT PERTAMA | 5 | 10 | 13 | 12 | 2 |
| Karena kealpaan menyebabkan orang lain mati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Korupsi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pelanggaran Susila | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Penganiayaan | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Penggelapan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Penipuan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tidak menaati perintah dinas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lain-lain | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

- Data Hakim dan Panitera yang bermasalah serta Pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Yudisial; Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya tidak terdapat Hakim dan Panitera yang bermasalah di dalam penanganan perkara dan juga tidak ada laporan-laporan dari para pihak atau pencari keadilan yang merasa dirugikan seerta Koordinasi antara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Komisi Yudisial telah berjalan sangat baik.
- Upaya yang dilakukan untuk memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang *online* serta kendala atau hambatannya. Pelaksanaan sidang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sampai dengan saat ini belum dilaksanakan secara *online* dan tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

- Upaya memenuhi Protokol Kesehatan adalah;
 - 1) Petugas mengarahkan para pihak yang akan melaksanakan persidangan untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu baik dengan sabun cuci tangan ataupun desinfektan.
 - 2) Petugas melaksanakan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun* terhadap para pihak yang akan melaksanakan persidangan
 - 3) Hakim, para pihak dan pengunjung sidang diwajibkan untuk memakai masker.
 - 4) Hakim, para pihak dan pengunjung sidang diwajibkan untuk memakai masker
- Realisasi pagu anggaran sampai dengan bulan Oktober 2020 telah mencapai 84,12%.
- Data perkara menonjol untuk tingkat pertama adalah penganiayaan sebanyak 2 kasus dan tingkat banding adalah senjata api sebanyak 10 kasus.
- Tidak terdapat Hakim dan Panitera yang bermasalah di dalam penanganan perkara dan juga tidak ada laporan-laporan dari para pihak atau pencari keadilan yang merasa dirugikan
- Koordinasi antara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Komisi Yudisial telah berjalan sangat baik.
- Pelaksanaan sidang sampai dengan saat ini belum dilaksanakan secara *online* dan tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

4. SESI PENDALAMAN :

- Apresiasi atas paparan bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang paham akan administrasi dan penyajiannya rapi. Kemudian kepada bapak Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terima kasih atas paparan bapak, dan mohon disampaikan kepada bapak Kepala Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk hadir jika ada rapat Komisi III selanjutnya. Begitu juga ucapan terima kasih kepada bapak Kepala Pengadilan Tinggi TUN atas Paparannya dan apresiasi WBK.
- Terkait masalah unruk membangun transparansi di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan menggunakan teknologi canggih yang ada.
- Apresiasi kepada Pengadilan Negeri Bojobaru yang telah melakukan terobosan terkait pada peradilan anak.
- Terkait Nimas di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya, menurut kami Jika memang itu layak dilakukan vonis bebas silahkan sesuai aturan yang ada.
- Terkait masalah Pengadilan menolak perkara Peninjauan Kembali (PK) Kepailitan, bagaimana pandangan pengadilan kedepan? Apakah PK boleh apa tidak diajukan kembali?
- Terkait Pandemi covid 19, Hakim wajib memeriksa disidang terbuka, dan alat bukti diperiksa langsung.
- Terkait napi yang Hukuman 5 tahun hingga hukum mati sebaiknya disidangkan setelah virus covid 19 berakhir di Indonesia.
- Terkait masalah Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terutama di blitar masalah kawin muda dengan mengeluarkan surat kuasa. masalah ekonomi menjadi factor tingginya angka perceraian terjadi di Jawa timur.
- Pegawai Pengadilan Negeri Tulung Agung yang berprestasi perlu perhatian khusus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memberikan penghargaan.
- Terkait dengan Pengadilan Kota Kediri bangunan sudah megah akan tetapi biaya pemeliharaan hanya 60 juta.
- Terkait Undang-undangan Jabatan Hakim, usia hakim antara 65 - 67 tahun.

Jawaban :

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya :

- Masalah Laporan tidak detil terima kasih atas atensinya
- PT Surabaya sudah melakukan sikma hanya bisa absen di daerah pengadilan untuk memantau hakim hadir apa belum di kantor.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya :

- Masalah melonjak perceraian mempermudah dengan kehati-hatian dan selektif.
- Persoalan perceraian tidak hanya keputusan hakim akan tetapi sebelum menikah sudah ada pemahaman terhadap nikah.
- Masa perkawinan dibawah umur perlu dilakukan sosialisasi dimasyarakat yang matang.

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya :

- Persoalan masalah utama adalah masalah anggaran
- Tuntutan WBM akan tetapi anggaran terbatas, begitu juga masalah fasilitas Gedung dan lain-lain.
- Mohon dukungan MA dan Jajaran pengadilan masalah anggaran
- Masalah RUU Jabatan Hakim, khususnya masa pensiun lebih diperpanjang lagi.
- Mengenai masalah eksekusi perlu dimasukan konten of court dan perkara-perkara perangkat desa.

Kepala Militer Tinggi III Surabaya :

- Persidangan dengan melalui Telecomfrence terima kasih masukan untuk perkara ringan jika perkara berat mungkin disidangkan setelah pandemic covid 19
- Usia pensiun perlu diperjuangkan dan dimudahkan oleh Tuhan maha kuasa.

5. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

5.1 BIDANG ANGGARAN

5.1.1 Realisasi Anggaran

- Pagu Anggaran tahun 2020 setelah Refocusing sebanyak Rp. 5.391.350.666.000,- Realisasi sampai dengan Oktober 2020 sebanyak Rp.4.145.963.992.844,- Anggaran yang belum terserap sebanyak Rp.1.245.386.673.156,-
- Realisasi sebesar 76.90% dan sisa sebesar 23 % yang diperkirakan akhir tahun akan terserap minimal 95 % sebagaimana target yang telah ditetapkan.
- Penyerapan anggaran berdasarkan dengan sumber dana sampai dengan oktober 2020 adalah Rupiah Murni sebesar Pagu Rp.4.614.340.233.000, realisasi Rp. 3.584.765.393.243 atau 77,69 %.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Pagu Rp.307.893.306. Realisasi Rp. 212.466.842.000 atau 69.01%, Badan Layanan Umum sebesar Pagu Rp. 451.161.541.000, Realisasi Rp.336.905.498.677. atau 74.68% dan Hibah sebesar Pagu Rp. 17.955.586.000,- Realisasi Rp. 11.826.258.924,- atau 65,86%.

5.1.2 Dukungan Anggaran

- Usulan prioritas untuk mewujudkan operasional kebijakan dan strategi dalam rangka memantapkan Kampung Tangguh Semeru (KTS) yaitu Rp.100.085.000,- X 6.031 Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 603.612.635.000,- (*Enam Ratus Tiga Miliar, Enam Ratus Dua Belas Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

5.1.2 BIDANG PENGAWASAN

5.1.2.1 Penanganan Perkara

- Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus di Polda Jatim paling menonjol Siber mencapai 50% diikuti oleh kasus Indagsi 23%, Tipidter 16%, Perbankan 6% dan Tipidkor 5%.
- Pengungkapan kasus yang menonjol tindak pidana khusus yaitu Kasus Peretas Situs KPU Jember dan Perkara siber permusuhan antar suku agama yang berpotensi besar terhadap Disintegritas Bangsa.
- Penanganan kasus Tindak Pidana Umum di Polda Jatim antara lain penanganan Demo Penolakan UU Cipta Kerja di Surabaya, Ungkap kasus Curas mengakibatkan petugas tertembak, pembunuhan berencana di Pasuruan, dan Dukun Cabul.

- Penangan Kasus Tindak narkoba pada tahun 2020 sebanyak 5074 kasus, tersangka 6.263 orang. Kasus yang menonjol peredaran narkoba dengan barang bukti 100.000 gram sabu dan 4000 butir pil Happy Five.
- Penanganan perkara Tindak Pidana Illegal Logging, Illegal Mining dan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana SDA dan Kerugian Negara sebesar Rp. 61.390.623.375,- Penyelamatan Kerugian Negara Keuangan Negara sebesar Rp.2.886.887.178,-.

5.1.2.2 Hambatan dan Kendala

- Hambatan dan kendala dalam Penyidikan antara lain;
 - 1) Penangan Covid 19
 - 2) Pengaman Pilkada Serentak Tahun 2020.

6 PERTEMUAN DENGAN KEPALA BNNP PROVINSI JAWA TIMUR

6.1 BIDANG ANGGARAN

6.1.1 Realisasi Anggaran

- Pagu Anggaran BNNP Jawa Timur adalah Pagu Anggaran Rp. 49.900.455.000,- Realisasi sebesar Rp. 35.402.865.122,-
- Penjelasan terkait Program prioritas nasional berada di BNN RI, akan tetapi ada beberapa yang pelaksanaan programnya diturunkan ke BNNP Jawa Timur, yaitu Program Pasca Rehabilitasi melalui Agen Pemulihan (AP) merupakan rangkaian akhir dari proses rehabilitasi berkelanjutan kegiatan lanjutan yang diberikan kepada mantan pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan/atau sosial serta telah kembali ke domisili bersama keluarga dan lingkungan masyarakat. Kegiatan pasca rehabilitasi meliputi pemantauan, pendampingan, dan bimbingan lanjut bagi mantan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh agen pemulihan. Agen pemulihan adalah masyarakat yang telah dibekali oleh BNN yang tinggal di kelurahan/desa dimana mantan penyalahguna berdomisili.
- Kendala yang dihadapi Pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan yang sudah terpola sesuai dengan DIPA tidak dapat terlaksana dengan tatap muka; Kurangnya kegiatan peningkatan kemampuan bagi petugas pelaksana program P4GN (penyidik, penyuluh, konselor adiksi, dokter dan perawat).

6.1.2 Dukungan Anggaran

- Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan Fungsi ; Pagu Anggaran Tahun 2021 BNNP Jawa Timur Dan Jajaran Berdasarkan Program Kegiatan sebesar Rp. 53.221.091.000,-
- Program prioritas tahun 2021 pada saat dilaksanakan penyusunan anggaran TA. 2021 di BNN RI, tidak ada program prioritas nasional yang diturunkan ke wilayah. Kebutuhan dukungan anggaran :
 - a) Dukungan anggaran untuk merealisasikan pembangunan fasilitas rehabilitasi berupa Balai Rehabilitasi BNN di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui Kementerian PUPR. Dengan ketersediaan lahan 11.000 meter persegi hasil rampasan KPK eks Bupati Bangkalan;
 - b) Dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi peserta bimtek life skill dalam rangka program pemberdayaan alternatif;
 - c) Penambahan dukungan distribusi kuota tunjangan kinerja untuk personil di wilayah (BNNP Jawa Timur dan BNN Kab/Kota);
 - d) Dukungan anggaran untuk pengadaan peralatan Intelijen yang lebih modern dan up to date, misal membangun Sarana dan Prasarana terkait Penyadapan di BNNP Jawa Timur;
 - e) Dukungan penambahan anggaran pelaksanaan Intelijen berbasis teknologi, dengan melihat capaian realisasi sampai dengan Oktober 2020 sudah terserap 90%
 - f) Dukungan anggaran yang diperuntukkan renovasi ruang tahanan BNNP Jawa Timur agar sesuai dengan standar ruang tahanan yang ditetapkan oleh Kemenkumham;
 - g) Dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor BNNKab/Kota bagi satuan kerja BNN Kabupaten/Kota yang telah memiliki lahan/tanah

bersertifikat hasil hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Kab. Malang, Kab. Kediri, Kab. Tuban, Kab. Sumenep, dan Kota Mojokerto).

6.2 BIDANG PENGAWASAN

6.2.1 Penanganan Perkara

- Terkait data mengenai pelaksanaan tugas BNNP Jawa Timur di Bidang Penindakan adalah Data capaian kinerja BNNP Jawa Timur dan jajaran per oktober 2020, Target LKN 25, Capaian LKN 51, Jumlah Tersangka 67 orang.
- Upaya dan Kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan penyalahgunaan Narkoba secara signifikan dan menimbulkan efek Jera yaitu berdasarkan hasil LKN dan jaringan yang telah berhasil diungkap oleh BNNP Jawa Timur pada tahun 2018, yaitu 3 (tiga) jaringan Madura dengan 8 (delapan) tersangka yang berasal dari Madura, dan tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) jaringan Madura dengan 9 (sembilan) tersangka yang berasal dari Madura dan 2 (dua) tempat kejadian perkara narkoba di Sampang Madura, sehingga tahun 2020 fokus kegiatan baik bidang pencegahan maupun pemberantasan diarahkan pada target Madura.
- Upaya yang dilakukan bidang Pemberantasan adalah ;
 - 1) Fokus untuk mengembangkan penyelidikan Jaringan di Wilayah Madura pada Tahun 2020. Jaringan yang telah diungkap per Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) Jaringan dengan dengan 5 (lima) tersangka. Salah satu unguap Kasus dari Jaringan Madura di Tahun 2020 yaitu berupa Penggerebekan di Ruko Gunung Anyar dan berhasil melakukan penyitaan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 8.223 (delapan ribu dua ratus dua puluh tiga) gram. Sampai dengan bulan Oktober 2020, BNNP Jawa Timur dan jajaran berhasil mengungkap 51 (lima puluh satu) LKN dengan barang bukti sebanyak 20.006,04 (dua puluh ribu enam koma nol empat) gram narkoba jenis sabu. BNNP Jawa Timur bukan hanya melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba namun juga menjerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memiskinkan Bandar dan membuat efek jera bagi pelaku narkoba.
 - 2) Upaya yang dilakukan bidang P2M dan Rehabilitasi.
 - 3) Kebijakan pelaksanaan Program P4GN TA. 2020 di BNNP Jawa Timur diarahkan ke Pulau Madura tepatnya di Kab. Sampang dan Bangkalan. Dengan mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah baik dari kalangan pemerintah, swasta (dunia usaha), masyarakat, dan pendidikan untuk memperkuat kemampuan daerah mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan kejahatan narkoba. Serta melakukan pemasangan berbagai himbauan di jalur darat (dengan memasang poster dan stiker di Terminal), dan pemasangan baliho di kawasan wisata (Pantai Lon Malang Sampang Madura) dan bandara (Juanda)
 - 4) Bidang rehabilitasi memberikan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dari rujukan penggiat-penggiat yang telah menerima intervensi bidang P2M. Adapun jumlah klien rehabilitasi voluntary (sukarela) asal Madura di Tahun 2017 sebanyak 14 (empat belas) orang, Tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) orang dan di Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) orang serta di tahun 2020 sebanyak 2 (dua) orang.
- Evaluasi terhadap Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan terkait upaya pemetaan terhadap jalur-jalur peredaran gelap Narkoba. Demikian pula, kendala dan hambatan yang masih dihadapi.
- Pemetaan jalur peredaran narkoba berdasarkan daerah rawan : Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor SE/4/KA/PM.01/2020/BNN tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan

Narkoba Pada Tahun 2020-2024, untuk tahun 2020 ditetapkan 4 (empat) daerah rawan narkotika di Prov Jawa Timur.

- Pemetaan jalur peredaran narkotika berdasarkan modus operandi di wilayah Jawa Timur.

6.2.2 Kendala dan Hambatan

- Kendala dan hambatan yang masih dihadapi antara lain ;
 - 1) Pandemi Covid 19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas dan kegiatan di Ruang penyadapan BNN RI;
 - 2) Permintaan data keuangan terperiksa atau saksi kepada lembaga keuangan yang telah terjalin kerja sama belum berjalan lancar karena berkaitan dengan rahasia perbankan dan lembaga keuangan (OJK dan PPATK);
 - 3) MoU di BNN RI dengan lembaga keuangan dan provider telekomunikasi tidak diturunkan ke BNNP yang mengakibatkan pelaksanaan intelijen berbasis teknologi dan proses ungkap TPPU relatif lebih lama;
 - 4) Terbatasnya SDM yang mendukung P4GN, yaitu petugas jaga tahanan, penyidik TPPU, konselor adiksi, asisten konselor adiksi, penyuluh narkotika, dokter, dan perawat.
 - 5) Terbatasnya Alat Material Khusus Teknologi Informasi yang handal dan unggul agar dapat memaksimalkan kegiatan penyelidikan;
 - 6) Kurangnya kegiatan peningkatan kemampuan bagi petugas pelaksana program rehabilitasi;
 - 7) Tempat rehabilitasi untuk compulsory tidak ada yang memenuhi standar keamanan sehingga tersangka yang sudah dilaksanakan asesmen terpadu tetap ditempatkan di Rutan atau Lapas, walaupun rekomendasi dari TAT yaitu rehabilitasi selama proses hukum berjalan;
 - 8) Peran serta dan respon dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat belum sesuai dengan harapan, masih banyak anggapan bahwa program P4GN adalah tugas BNN
- Sinergitas dan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, maupun pihak terkait lainnya, baik dalam pencegahan atau antisipasi di berbagai jalur, termasuk LP/Rutan, maupun dalam penindakan.
- Sinergitas dan kerja sama dengan Kepolisian :
 - 1) Anggota tim hukum dalam pelaksanaan asesmen terpadu
 - 2) Dukungan penitipan tersangka selama penyidikan sampai dengan proses tahap II;
 - 3) Penyediaan personil Polri penugasan di luar struktur organisasi;
 - 4) Tukar data dan informasi terkait jaringan narkoba dengan Direktorat Narkoba Polda Jatim;
 - 5) Uji laboratorium forensic barang bukti narkotika dan HP di bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
 - 6) Koordinasi yang baik terkait latihan menembak dan surat ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api
- Sinergitas dan kerja sama dengan Kejaksaan : Anggota tim hukum dalam pelaksanaan asesmen terpadu; dan Koordinasi yang baik terkait proses penyidikan narkotika dan TPPU.
- Sinergitas dan kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti Koordinasi berupa kegiatan interdiksi di pintu-pintu masuk wilayah Jawa Timur yaitu di Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api, Terminal, jalan Tol, serta jasa ekspedisi; dan Kerja sama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, LRIP, LRKM, BLK, dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan;
- Agar terjalin koordinasi yang sinergis dengan pihak penegak hukum lainnya dengan mengundang instansi tersebut dalam Coffee Morning dalam rangka pemecahan masalah dalam pencegahan dan antisipasi di LP maupun Rutan; Menempatkan mobil X-Ray BNNP Jawa Timur di Lapas/Rutan sebagai bentuk pengawasan barang bawaan Pengunjung ke Lapas/Rutan; Kerja sama dengan Kemenkumham (Bapas) terkait pelaksanaan asesmen

terpadu; Koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot/Pemkab sehingga terbentuknya Regulasi Fasilitasi P4GN (Perda); Terbentuknya Tim Terpadu sebagai implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi program P4GN; Pelaksanaan tes urin bagi calon pengantin sesuai perjanjian kerja sama antara BNNP Jawa Timur dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur.

3. SESI PENDAHULUAN :

Pada sesi Pendalaman Anggota Tim Komisi III DPR RI menanyakan/ menanggapi beberapa hal sebagai berikut;

- Terkait masalah Komunikasi antara Komisi III dan Mitra kerja baik itu Kepolisian maupun BNNP Provinsi Jawa Timur perlu dijaga.
- Apresiasi kepada Bapak Kapolda Jawa Timur dan jajaran atas program kerja “Kampung Tangguh Semeru” (KTS) dalam mengaktifkan fungsi Bhabinkantibmas untuk membina kampung Tangguh Semeru harap dipertahankan.
- Terkait penanganan Tindak Pidana Demonstrasi yang akhir ini meningkat terutama pasca pengesahan RUU CIPTA KERJA di DPR sehingga mengakibatkan demonstrasi diberbagai wilayah. Dalam hal ini diharap kepada aparat penegakan hukum untuk menerapkan hukum yang berlaku demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Apresiasi kepada Kapolres Bojonegoro yang telah menindak kepala daerah yang melanggar hukum dalam pandemic covid 19.
- Masalah sosial terkait bantuan sosial perlu pengawalan yang tepat agar tidak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- LSM yang menakuti kepala desa dan kepala sekolah dengan menggunakan Lambang KPK persis.
- Apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum atas penghargaan Presiden bahwa Jawa Timur menjadi contoh proyek cerdas
- “Kampung Tangguh Semeru” menjadikan semua bidang Jatim Tangguh sehingga menjadi Program Nasional.
- Masalah penegakan disiplin, angka pandemic covid 19 bisa ditekan.
- Anggaran Jawa Timur bisa di jembatan dengan pemerintah daerah untuk menunjang program Kampung Tangu Semeru.
- Terkait Razia sebaiknya diumumkan satu hari sebelum Razia.
- Kasus mencabul anak tiri di Tulung agung mohon menjadi atensi aparat penegak hukum.

Jawaban :

Kapolda Jawa Timur :

- Terkait dengan “ Kampung Tangguh Semeru” melakukan 3 T (Testing, Treasure dan Teguh). Dengan mengaktifkan Bhabinkatibmas yang ada di kepolisian untuk saat ini di Jatim sudah ada 2920 Kampung Tangguh Semeru.

- Terkait dengan 100 Juta per Kampung Tanguh bisa dipertanggungjawabkan, Kapolda Jatim yakin bisa melakukannya dengan dana Rp.100.000.000,- sebagai dana untuk mengembangkan kampung Tanguh tersebut. Dana ini hanya dana awal bisa jadi naik dan bisa juga turun.
- Terkait dengan nada kejenuhan terkait dengan penanganan covid 19 di Jatim, asalkan menerapkan protocol Kesehatan yang diatur.
- Terkait dengan Preman di Jatim kita akan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Masalah Pilkada serentak perlu didiskusikan dengan KPU, Bawaslu dengan cara baik-baik.
- Wilayah laut seperti Tuban, Malang, Blitar sudah kami suratin pihak terkait. Kami mendukung Pertamina untuk kemajuan Indonesia kedepan.
- Terakait dengan Komisi III Dapil Jawa Timur akan kami dalam kinerjanya kedapil, kepolian ada karena komisi III DPR RI
- Terkait kasus pencabulan anak akan kami atensi sesuai aturan yang berlaku.

BNNP Provinsi Jawa Timur :

- Ucapan ribuan terima kasih kepada anggota komisi III pak Arteria Dahlan yang sudah melihat dan mengunjungi kantor kami BNNP Provinsi Jatim sebelumnya.
- Kami ucapan Terima kepada Tim Komisi III yang sudah ke Jawa Timur.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Tim Kunjungan Kerja

Komisi III DPR RI,

Pimpinan,